

**PENGEMBANGAN DESA SIAGA DAN
PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010

**PENGEMBANGAN DESA SIAGA DAN
PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN**

diajukan oleh
Mona Isabella Saragih
NIM 08.93.0030





PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : MONA ISABELLA S

Nim : 08.93.0030

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 11 November 2010

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Dr. P. Lindawati S. Sewu, SH., MHum
2. Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine , M.Epid., FICs., MH Kes
3. Yovita Indrayati, SH., MHum

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 14 November 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SII., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas terselesaikannya penulisan Tesis ini, karena hanya kehendakNyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "**PENGEMBANGAN DESA SIAGA DAN PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA PERLINDUNGAN BAGI BIDAN**" Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya, kepada:

Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widjanarko MSc selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata,

Bapak Dr. Ir Rudy Soesilo, MSA selaku Direktur Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata yang telah memberikan penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata;

Prof. Dr. Willa Chandrawila Supriadi, SH, selaku guru dan cendikiawan hukum yang telah memberikan bimbingan, masukan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;

Dr. Lindawaty Sewu, SH, Mhum, selaku pembimbing utama, yang banyak memberikan masukan, arahan serta pencerahan kepada penulis selama pembuatan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

Dr. Agus Hadian Rahim, dr SpOT(K), M.Epid, MH.Kes, FICS, selaku pembimbing pendamping, yang telah banyak memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

Yovita Indrayati, SH, MHum, selaku penguji yang banyak memberikan masukan, arahan serta pencerahan kepada penulis selama pembuatan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Keluarga besar angkatan VI dan seluruh civitas akademika Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang kelas paralel Bandung yang telah membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Kepada Mama, Abang, Adik serta Keponakan -keponakanku yang manis - manis Khususnya kepada Abang Oberlin B Pasaribu terimakasih atas kesabaran dan dukungan yang selama terus membantu mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Teman – teman Pascasarjana konsentrasi Hukum Kesehatan Soegijapranata Angkatan VI dan VII yang bersedia membantu dan mendukung sehingga tesis ini dapat selesai.

Bandung, Oktober 2010

Mona Isabella Saragih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah Dan Identifikasi Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	10
1. Spesifikasi Penelitian	10
2. Merode Pendekatan	11
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	14
6. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Desa Siaga	17
1. Pengertian Desa Siaga	17
2. Kriteria Desa Siaga	17
3. Tujuan Desa Siaga	20
4. Sasaran Desa Siaga	20
5. Perkembangan Desa Siaga	21
6. Peran Desa Siaga Dalam Mewujudkan Indonesia Sehat	22
7. Penyelenggaraan Desa Siaga	23
8. Pertanggungjawaban (Indikator)	28

BAB III PELAYANAN KIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN

A. Hak Atas Kesehatan	33
1. Pengertian Kesehatan	33
2. Hak Atas Kesehatan	34
B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	36
1. Pengertian	36
2. Tujuan	36
3. Kegiatan	38
4. Sistem Kesiagaan di Bidang KIA	37
5. Manajemen Kegaitan KIA	41
6. Peran dan Wewenang Bidan	44

C. Perlindungan Hukum Bagi Bidan	51
1. Pengertian Perlindungan Hukum	54
2. Tujuan Hukum	55
3. Azas Hukum	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengembangan Desa Siaga	64
B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.....	69
C. Perlindungan Hukum Bagi Bidan	72
D. Pengembangan Desa Siaga dan Pemenuhan Pelayanan KIA serta perlindungan Hukum bagi Bidan.....	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mona Isabella Saragih, Peserta
Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 08.93.0030

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Oktober 2010

Mona Isabella Saragih

ABSTRAK

PENGEMBANGAN DESA SIAGA DAN PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN

Hak manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN), terutama pada pemberdayaan sub sistem masyarakat, salah satu tujuan dari SKN adalah untuk melakukan upaya pelayanan, advokasi dan pemantauan sosial dengan individu, kelompok dan masyarakat dalam kesehatan yang efektif dan efisien, untuk memastikan pembangunan kesehatan berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Desa Siaga adalah mobilisasi masyarakat untuk mempromosikan kesiapan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan darurat kesehatan secara mandiri, pelayanan kesehatan Ibu dan Anak meliputi upaya kesehatan yang melibatkan pelayanan dan perawatan bagi wanita hamil, wanita melahirkan, menyusui, bayi dan anak pra sekolah, sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk preventif atau represif tertulis atau tidak tertulis.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi literatur, dan analisis data normatif dengan metode kualitatif. Kegiatan ekspansi desa siaga melalui Poskesdes menyebabkan mengurangi pelayanan kesehatan ibu dan anak, dimana dalam bidan Poskesdes melakukan perawatan darurat dasar kebidanan serta pelayanan kesehatan dasar untuk mencegah kematian ibu dan anak mencakup pemantauan melahirkan menggunakan partografi, penggunaan teknologi aktif Tahap Ketiga, penyaringan dan penanganan pre ekklamsia penggunaan teknologi sepsis dengan resusitasi bayi yang baru lahir. Lima kegiatan yang dilakukan oleh bidan di Poskesdes, Empat adalah kewenangan bidan menurut 149/Menkes/SK/VII/2010 No Pemenkes terhadap persetujuan dan praktik bidan, Salah satu kegiatan yang tidak termasuk dengan hukum adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap 14 penyakit. Oleh karena itu ketika seorang bidan desa melakukan aktivitas ini, mereka tidak dilindungi oleh hukum.

Kata kunci: Ekstensi kewaspadaan Desa, Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan, Undang-undang perlindungan untuk bidan.

ABSTRACT

EXPANSION OF ALERT VILLAGE AND COMPLIANCE OF MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICE WITH LAW PROTECTION FOR MIDWIFE

It's human right to received health services according to National Health System (NHS), specifically on community empowerment sub system, one of the purpose of NHS is to carried out effort of services, advocacy and social monitoring by individu, group and community in health in effectively and efficiently, to ensure successful health development to increase the level of community health. Alert village is community mobilization to promote community readiness to prevent and overcome health issues, disaster and health emergency independently. Maternal and Child Health service include efforts in health involving services and care for pregnant women, childbirth women, breastfeeding, neonatal and child with pre school, while law protection is a protection given to the subject of a law in a form of preventive or repressive, written or not written.

The methods used with normative juridical approach, with a spesification that is descriptive analytical. Using secondary data, data collection techniques is the study of literature, and analysis of normative data with qualitative methods.

Alert village expansion activities thru Poskesdes causing diminish of maternal and child health services, where in the Poskesdes midwife perform basic emergency obstetric care as well as basic health services to prevent mother and child death include monitoring childbirth using partograf Active Management Third Stage, screening and handling of pre eclampsia and sepsis manajement with newborn resuscitation. Of Five activities perform by midwife in Poskesdes, Four are the authority of midwife according to Pemenkes No. 149/Menkes/SK/VII/2010 towards consents and midwife practice, One activity not include with the law is the basic medical service toward 14 diseases therefore when a village midwife perform this activity, they are not protected by law.

Key words : Extention Allert Village, Maternal and Child Health Service, Law protection for midwives.